

**PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STRATEGI PELEMBAGAAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

**Frans Setia Hamonangan Nadeak**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email Korespondensi: fransnadeak6@gmail.com

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to analyze the political institutionalization strategy of the United Development Party (PPP) in the 2024 Legislative Election and to identify the supporting and hindering factors in the institutionalization of the party. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews and document analysis. Data obtained from key informants involved in the electoral process, such as party officials, legislative candidates, and political experts, are analyzed to describe the internal and external dynamics that influence PPP's institutionalization strategy. The findings of the research indicate that the main supporting factors in PPP's institutionalization include the strengthening of a solid organizational structure and moderate, inclusive ideological values. However, on the other hand, there are obstacles related to the tension between ideological values and the demands of political pragmatism, which negatively affect the party's image among younger voters. Additionally, external factors such as political coalitions influence the party's decision-making autonomy, reducing the effectiveness of PPP's institutionalization strategy. This research is expected to contribute to the development of political party studies in Indonesia, particularly regarding institutionalization strategies in the face of contemporary political challenges. Furthermore, the findings can serve as an evaluation tool for PPP to improve their strategy and address the challenges faced in future legislative elections.

**Keywords:** Political institutionalization, United Development Party, 2024 Legislative Election.

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pelebagaan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilihan Legislatif 2024 serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelebagaan partai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari informan kunci yang terlibat dalam proses pemilu ini, seperti pengurus partai, calon legislatif, dan ahli politik, dianalisis untuk menggambarkan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pelebagaan PPP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama dalam pelebagaan PPP adalah penguatan struktur organisasi yang solid serta nilai-nilai ideologi yang moderat dan inklusif. Namun, di sisi lain, terdapat hambatan terkait ketegangan antara nilai ideologi dan tuntutan pragmatisme politik, yang memperburuk citra partai di mata pemilih muda. Selain itu, faktor eksternal seperti koalisi politik turut memengaruhi otonomi keputusan partai, yang mengurangi efektivitas strategi pelebagaan PPP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian partai politik di Indonesia, khususnya mengenai strategi pelebagaan dalam menghadapi tantangan politik kontemporer. Selain itu, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PPP untuk memperbaiki strategi dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemilihan legislatif mendatang.

**Kata kunci:** Pelebagaan politik, Partai Persatuan Pembangunan, Pemilihan Legislatif 2024.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

121

Indexed



## PENDAHULUAN

Pada masa kolonial, umat Islam di Indonesia mendirikan berbagai organisasi dan partai politik sebagai respons terhadap penindasan kolonial (Ricklefs, 1993). Salah satu organisasi yang penting dalam konteks ini adalah SI, yang didirikan pada awal abad ke-20 sebagai organisasi ekonomi untuk melawan dominasi ekonomi Belanda (Ricklefs, 1993). Seiring waktu, Serikat Islam berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak sosial dan kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1923, berubah nama menjadi PSI Kemudian, pada tahun 1929, nama partai ini diubah lagi menjadi PSII sebagai bentuk konsolidasi dan penegasan identitas politik Islam yang lebih kuat dalam pergerakan nasional.

Setelah kemerdekaan Indonesia muncul berbagai partai politik Islam sebagai respons terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang, terutama menjelang Pemilu 1955. Beberapa partai Islam yang terbentuk pada periode ini antara lain PPTI, NU, PTI, dan Partai Masyumi (C. Suryana et al., 2024). Partai-partai ini memiliki latar belakang dan ideologi yang beragam, namun semuanya berfokus pada peran agama Islam dalam politik Indonesia. Masing-masing partai tersebut berusaha untuk mengartikulasikan aspirasi umat Islam dalam kerangka negara yang baru merdeka, sambil memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Jackson, 2023). Oleh karena itu, kemunculan partai-partai Islam ini mencerminkan upaya umat Islam Indonesia untuk mempengaruhi arah kebijakan politik pasca-kemerdekaan.

Dinamika politik di tanah air semakin kompleks dengan munculnya kelompok-kelompok nasionalis, baik yang berafiliasi dengan Islam maupun non-Islam. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Taman Siswa, dan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia memperlihatkan keberagaman ideologi dan tujuan dalam perjuangan kemerdekaan serta pembentukan negara yang baru (Hermawati, 2020). Di sisi lain, partai-partai politik Islam mengalami perpecahan internal yang cukup signifikan, di mana perselisihan antara elit politik menyebabkan fragmentasi (Mas'ad, 2019).

Pemilu 1955 menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana partai-partai Islam seperti NU, Masyumi, PPTI, dan PTI memainkan peran signifikan dalam menentukan arah politik negara yang baru merdeka (Alawi, 2019). Pemilu ini memungkinkan partai-partai Islam untuk menunjukkan eksistensi politik mereka dan memperjuangkan pengaruh dalam pembuatan kebijakan negara. Meskipun perolehan suara yang cukup besar pada saat itu menunjukkan kekuatan politik mereka, banyak dari partai-partai Islam ini mengalami fragmentasi dan perubahan struktural dalam beberapa dekade berikutnya, seiring dengan pergeseran dinamika politik yang lebih luas, baik internal maupun eksternal (Federspiel, 2020). Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan ini termasuk perbedaan ideologi internal, dampak dari kebijakan pemerintah yang lebih sentralistik, serta peran politik militer yang semakin dominan (Tirtayasa, 2025). Keberadaan partai-partai Islam ini, meskipun mengalami kemunduran, tetap memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia, baik pada level nasional maupun daerah.

Perdebatan mengenai ideologi negara antara Pancasila dan Islam merupakan isu sentral yang muncul dalam BPUPKI (Priyono, 2023). Dalam menghadapi perbedaan pandangan antara ideologi nasionalis dan Islam, para pemimpin Islam berusaha menjalin kompromi dengan para pemimpin nasionalis untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak. Piagam Jakarta, yang disusun sebagai hasil kompromi tersebut, mencerminkan upaya untuk menciptakan kesepakatan yang inklusif di tengah perbedaan ideologi.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelompok-kelompok Islam memberikan respons positif terhadap perubahan politik nasional, dengan mengorganisir diri melalui partai-partai politik seperti Masyumi, Perti, dan PSII (Azra, 1970). Dalam tubuh Masyumi sendiri, terdapat dua arus besar pemikiran Islam, yaitu kelompok modernis yang lebih rasional dan reformis serta kelompok tradisional yang menjunjung tinggi warisan keagamaan klasik. Ketegangan antara kedua kelompok ini memuncak ketika NU yang semula tergabung dalam Masyumi, memisahkan diri karena perbedaan pandangan politik dan ketidaksesuaian dalam distribusi kekuasaan, terutama dalam persoalan pembagian kursi kabinet (Hidayatullah, 2019). Masyumi menganggap sikap NU sebagai bentuk disloyalitas yang berpotensi

mengganggu stabilitas politik internal partai.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan penyederhanaan sistem kepartaian melalui kebijakan fusi partai politik pada tahun 1973. Kebijakan ini menggabungkan berbagai partai politik Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dan partai-partai nasionalis serta sekuler ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (Naku et al., 2024). Dalam UU No 19 tahun 1965 di luar dua partai ini, terdapat Golkar yang secara hukum dan konstitusional tidak dikategorikan sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mewakili kekuatan sosial fungsional dalam masyarakat (Yuniarto, 2016). Golkar berfungsi sebagai kendaraan politik utama rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, dan memperoleh keistimewaan politik melalui dukungan birokrasi, militer, dan aparaturnegara lainnya. Kehadiran Golkar sebagai kekuatan dominan menciptakan struktur politik semu multipartai yang bersifat hegemonik, di mana persaingan elektoral berlangsung secara formal, namun tanpa keseimbangan kekuasaan yang sejati.

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade berakhir pada Mei 1998, menyusul krisis ekonomi parah yang melanda Asia pada tahun 1997–1998 serta tekanan politik dan sosial yang semakin intensif dari berbagai elemen masyarakat (Suparno, 2012). Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela, serta pembatasan terhadap kebebasan politik dan hak sipil mendorong lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok intelektual. Salah satu tuntutan utama dari gerakan ini adalah pembubaran struktur politik yang represif, termasuk dominasi tunggal Golkar dalam sistem kepartaian nasional. Salah satu dari runtuhnya Orde Baru adalah penghapusan sistem penyederhanaan partai yang diberlakukan sejak tahun 1973, yang sebelumnya membatasi eksistensi politik hanya pada tiga kekuatan: PPP, PDI, dan Golkar. Dengan dimulainya era Reformasi, kebebasan berpolitik dipulihkan melalui revisi Undang-Undang Partai Politik, yang memungkinkan pembentukan partai baru tanpa campur tangan negara secara represif.

Reformasi politik ini juga mencakup perubahan sistem pemilu yang lebih terbuka, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan lembaga demokrasi. Kondisi ini menciptakan ruang politik baru bagi munculnya partai-partai berbasis ideologi, termasuk partai-partai Islam (Admin Indonesia investments, 2018). Salah satu yang paling menonjol adalah Partai Keadilan yang didirikan pada tahun 1998 dan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002 (Romli, 2011). PKS tampil dengan pendekatan yang lebih modern dan adaptif terhadap wacana politik kontemporer, berhasil menarik dukungan dari kelompok kelas menengah, pemuda, dan kalangan urban Muslim (Romli, 2011). Selain PKS, partai-partai Islam lainnya seperti PKB yang lahir dari basis Nahdlatul Ulama dan PPP tetap aktif dalam kontestasi politik, meskipun kerap kali terfragmentasi baik dalam orientasi ideologis maupun strategi politik. Partai Persatuan Pembangunan sudah mengikuti 11 kali dalam pemilihan legislatif. Namun dari tahun 1977-2019 partai selalu lolos ke senayan dalam pemilihan legislatif akan tetapi pada pemilu 2024 partai ini mengalami penurunan jumlah suara kursi dan mengakibatkan tidak lolos ke parlemen. Pada pemilihan umum tahun 1999-2014 perolehan suara dan kursi partai persatuan pembangunan naik turun akan tetapi partai ini bisa lolos ke parlemen. Permasalahan PPP pada pemilu tahun 2024 partai ini mengalami penurunan suara secara signifikan 3,87% yang mengakibatkan partai ini untuk pertama kalinya sejak mengikuti pemilihan umum di tahun 1977 tidak lolos ke parlemen (Admin Tempo, 2024). Pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi berbagai tantangan politik yang signifikan, meskipun partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Salah satu langkah strategis PPP dalam Pemilu 2019 adalah bergabung dengan KIK yang didominasi oleh PDI-P, bersama dengan partai-partai besar lainnya, seperti Partai Golkar dan Partai NasDem (Subekti, 2019). Koalisi ini mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua, yang menjadi langkah penting bagi PPP untuk memastikan pengaruhnya dalam pemerintahan jika pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih (Rahadian, 2018). Dalam konteks koalisi, PPP memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam, mengingat Ma'ruf Amin, yang merupakan calon wakil presiden, memiliki kedekatan dengan kalangan ulama. Program-program yang diusung PPP dalam Pemilu 2019 pun banyak berfokus pada isu-

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

123

Indexed



SINTA 5



isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas PPP.

Menjelang Pemilu 2024, PPP menghadapi sejumlah fenomena yang mencerminkan dinamika politik Indonesia. PPP, sebagai salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi fenomena ini adalah krisis kepemimpinan yang telah terjadi dalam tubuh PPP. Partai ini mengalami perubahan kepemimpinan yang cukup sering, yang menurunkan stabilitas organisasi dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja partai. Pada 2022, terjadi dualisme kepemimpinan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono, yang menguras energi partai dan mengalihkan fokus dari persiapan pemilu (Sidik, 2022). PPP menghadapi sejumlah dinamika penting terkait dengan strategi koalisi politik. Seiring dengan ketatnya persaingan politik, PPP memutuskan untuk bergabung dalam koalisi dengan partai-partai besar guna memperbesar peluangnya dalam meraih kursi di parlemen. Salah satu koalisi utama yang dibentuk PPP adalah dengan Partai Golkar, PAN, dan beberapa partai lainnya dalam koalisi yang dikenal dengan nama KIB (Nicholas Ryan Aditya, 2022). Di pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ada 24 partai politik yang ikut berkontestasi dalam pesta politik dimana ada 18 partai politik nasional, dan 6 partai politik lokal Aceh (KPU, 2022). partai-partai Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan relevansi politik mereka. Meskipun beberapa partai Islam telah berhasil memperkuat kelembagaan internal, mereka masih harus bersaing dengan partai-partai sekuler yang memiliki dukungan lebih luas. Koalisi politik menjadi kunci bagi partai-partai Islam untuk memperbesar peluang mereka dalam memenangkan kursi legislatif, namun kesulitan dalam mencapai kesepakatan koalisi yang solid seringkali menjadi hambatan.

Pada tanggal 20 Maret 2024, keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil suara pemilihan legislatif 2024 pada hasil pengumuman terdapat 8 partai politik yang lolos dan 10 partai politik yang tidak lolos ke parlemen 2024 (Jimenez Salim, 2024). Dari hasil pengumuman tersebut 8 partai politik yang lolos ke parlemen diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, serta 10 partai politik tidak lolos adalah Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, PSI, Perindo, PPP dan Partai Ummat (Jimenez Salim, 2024). Menariknya dari 10 partai politik yang tidak lolos ke parlemen, ada 1 partai politik yang ingin dijadikan topik penelitian yaitu PPP. Pada saat pemilu 2024 di tanggal 30 April 2023, PDI-P dan PPP menandatangani kesepakatan kerja sama politik untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Khoirunnisaa, 2023). Namun, meskipun koalisi ini dibentuk dengan tujuan yang jelas, tantangan besar tetap dihadapi dalam hal konsolidasi internal dan strategi pemenangan yang efektif. Perbedaan ideologi dan basis pemilih antar partai dalam koalisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesolidan dan mencapai tujuan bersama (Gaffar, 2023). Terdapat gambar indeks partai pemilu 2024 dan analisis gambar sebagai berikut:

**Gambar 1: Indeks Pelembagaan Partai Politik Pemilu 2024**



Sumber: BRIN, 2024

Berdasarkan data Badan Riset Inovasi Nasional terdapat sembilan partai politik yang memiliki indeks pelebagaan partai politik pemilu di tahun 2019. Di pemilu 2024 ada satu partai politik yaitu PPP merupakan yang paling lemah dalam pelebagaan partai. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam segi pelebagaan partai, PPP menempati posisi terlemah dengan skor 66,92 % (BRIN, 2024). Tidak tercapainya ambang batas perolehan suara PPP ke senayan disebabkan karena melemahnya pelebagaan partai (Antaraneews, 2024). Kelemahan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam hubungan internal dan eksternal dalam menghadapi pemilu 2024 (Saptohutomo Putranto, 2024). Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penelitian ini terfokus untuk membahas pelebagaan partai politik di Indonesia: strategi pelebagaan PPP dalam pemilihan legislatif 2024.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam konteks Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses dan dinamika pelebagaan partai politik, dengan menekankan pada bagaimana PPP mengelola dan memperkuat struktur internal serta eksternal dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Data yang diperoleh dari informan kunci yang terlibat dalam proses pemilu ini, seperti pengurus partai, calon legislatif, dan ahli politik, dianalisis untuk menggambarkan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pelebagaan PPP.

## PEMBAHASAN

### Teori Pelebagaan Partai Politik

Teori Randal dan Svasand tentang pelebagaan partai politik mengemukakan bahwa proses pelebagaan partai politik melibatkan pembangunan struktur yang stabil, aturan yang jelas, serta kemampuan partai untuk bertahan dan beradaptasi dalam jangka panjang dalam sistem politik. Randal dan svasand mensifikasikan pendapat-pendapat para ahli mengenai partai politik tersebut menjadi kesatuan variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya. Proses pelebagaan ini dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural (Vicky Randal dan Lars Svasand, 2002a),. Dalam dua aspek Ia memberikan pandangan empat dimensi pada indikator teori yaitu:

Tabel 1: Dimensi Teori Pelebagaan Partai Politik Randal dan Svasand

Dimensi	Internal	Eksternal
Struktural ( <i>Structural</i> )	Kesisteman ( <i>Systemness</i> )	Otonomi Keputusan ( <i>Decisional Autonomy</i> )
Kultural ( <i>Kultural</i> )	Identitas Nilai ( <i>Value Infusion</i> )	Citra Publik ( <i>Reifikation</i> )

Sumber:(Vicky Randal dan Lars Svasand, 2002b)

Adapun dimensi pelebagaan partai politik pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut (Vicky Randal dan Lars Svasand, 2002c):

1. *Systemness* (kesisteman) merupakan persilangan aspek internal dan struktural, Kesisteman adalah sebuah proses pelaksanaan fungsi partai politik, termasuk resolusi konflik, dilakukan sesuai dengan aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.
2. *Value infusion* (identitas nilai) merupakan hasil dari persilangan aspek internal dengan kultural. Identitas nilai adalah keberhasilan partai dalam menciptakan budaya atau sistem nilai yang khas dan dapat dilihat sebagai aspek penting dari kohesi partai.
3. *Decisional autonomy* (otonomi keputusan) adalah suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. Otonomi keputusan adalah di mana sebuah partai tidak sepenuhnya bergantung pada lembaga atau kelompok sponsor atau hanya dalam beberapa pengertian netral 'terkait' dengannya (dalam literatur 'keterkaitan' umumnya dianggap sebagai hal yang baik. Jika partai jelas merupakan elemen

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

125

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



dominan dalam hubungan tersebut, tingkat saling ketergantungan dapat memiliki positif, dalam hal memperluas sumber daya (yang mungkin sangat dibutuhkan) dan, tentu saja pelembagaan eksternal,

4. *Reifikation* (citra publik) terhadap suatu partai politik sebagai aspek persilangan dari aspek eksternal dengan aspek kultural. Reifikation (citra publik) merupakan sejauh mana keberadaan partai terbentuk dalam imajinasi publik.

Teori pelembagaan partai politik Randal dan Svasand merupakan teori yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai teori utama dalam fenomena penelitian strategi pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan pemilihan legislatif 2024 Analisis penulis pada topik penelitian ini dalam menggunakan teori pelembagaan partai politik Randal dan Svasand adalah bagaimana PPP telah menjalankan proses pelembagaan tersebut dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks menjelang Pemilu 2024.

## Strategi Pelembagaan Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024

Strategi kesisteman Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Legislatif 2024 menunjukkan adanya upaya memperkuat struktur organisasi partai melalui penerapan AD/ART, penyusunan hierarki dari pusat hingga ranting, serta kaderisasi berbasis wilayah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun koneksi langsung antara struktur partai dan konstituen lokal. Namun, implementasinya masih diwarnai berbagai hambatan, seperti fragmentasi elite internal dan ketidakteraturan dalam pelaksanaan kaderisasi. Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan realitas di daerah menyebabkan efektivitas program tidak merata. Ketegangan antar elite juga melemahkan pengambilan keputusan internal, sehingga strategi kesisteman partai belum sepenuhnya mampu membangun kelembagaan yang solid dan berkelanjutan. Dalam membangun identitas nilai, Partai Persatuan Pembangunan berusaha menampilkan diri sebagai partai Islam yang moderat dan inklusif, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip Islam sebagai fondasi ideologis. Strategi ini ditujukan untuk memperluas basis dukungan tanpa kehilangan jati diri ideologis. Namun, langkah politik yang cenderung pragmatis, terutama keterlibatan dalam koalisi dengan partai nasionalis, menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih mengenai konsistensi ideologis Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, partai juga dinilai belum mampu mengartikulasikan nilai-nilai Islam yang progresif kepada generasi muda, yang lebih tertarik pada isu-isu sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, strategi identitas nilai Partai Persatuan Pembangunan masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan antara ideologi partai dan kebutuhan konstituen yang dinamis.

Otonomi keputusan merupakan indikator penting dalam pelembagaan eksternal Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun secara formal partai menyatakan keputusan besar, termasuk dalam mendukung calon presiden, dilakukan melalui musyawarah internal, namun berbagai temuan menunjukkan bahwa tekanan dari kekuatan eksternal, seperti mitra koalisi, turut memengaruhi arah kebijakan partai. Hal ini mengindikasikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan belum sepenuhnya mampu menjaga independensi dalam pengambilan keputusan strategis. Keterlibatan dalam koalisi besar seringkali membuat Partai Persatuan Pembangunan menyesuaikan arah politiknya dengan kepentingan koalisi, bukan berdasarkan landasan ideologis dan kalkulasi internal semata. Dengan demikian, otonomi keputusan Partai Persatuan Pembangunan masih relatif lemah dan membutuhkan penguatan sistem internal agar mampu berdiri secara mandiri dalam sistem politik yang kompetitif.

Strategi pembangunan citra publik Partai Persatuan Pembangunan dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi dinamika politik yang semakin pragmatis. Upaya untuk menampilkan citra sebagai partai Islam yang inklusif belum diiringi dengan konsistensi dalam penyampaian pesan politik dan adaptasi terhadap perubahan preferensi pemilih. Terutama, kegagalan partai dalam merespons isu-isu yang relevan bagi generasi muda seperti pendidikan, pengangguran, dan kesetaraan sosial menyebabkan Partai

Persatuan Pembangunan kehilangan daya tarik di segmen tersebut. Selain itu, partai dinilai belum optimal dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Dalam konteks ini, transformasi dalam strategi komunikasi publik menjadi sangat penting bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk membangun kembali citra yang relevan, responsif, dan berdaya saing di tengah lanskap politik digital.

## **Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024**

### ***Faktor Pendukung Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2024***

Kesisteman Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Legislatif 2024 ditunjukkan melalui upaya membangun struktur organisasi yang lebih desentralistik dengan pendekatan kaderisasi berbasis wilayah. Strategi ini mendorong otonomi daerah dalam pengambilan keputusan dan memperkuat kedekatan partai dengan konstituen lokal. Pendekatan ini sesuai dengan teori Randall dan Svasand yang menekankan pentingnya keberlanjutan struktur organisasi partai dari pusat hingga daerah. Namun, sentralisasi pengambilan keputusan di tingkat pusat masih menjadi kendala, menghambat respons cepat terhadap kebutuhan daerah dan menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi lokal. Identitas nilai Partai Persatuan Pembangunan dibangun di atas prinsip Islam moderat yang inklusif dan menghargai keberagaman. Hal ini tercermin dalam komitmen partai terhadap nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dalam AD/ART dan praktik politiknya, terutama di tingkat daerah. Namun demikian, partisipasi dalam koalisi politik yang pragmatis terkadang menimbulkan ketidakkonsistenan antara nilai ideologis dan keputusan politik, sehingga mengaburkan identitas partai di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa value infusion dalam Partai Persatuan Pembangunan belum sepenuhnya meresap dalam praktik politik tingkat nasional, meskipun tetap kuat di tingkat lokal.

Dalam hal otonomi keputusan, Partai Persatuan Pembangunan menghadapi dilema antara menjaga independensi kebijakan dan tuntutan pragmatisme dalam koalisi politik. Di tingkat pusat, keputusan strategis partai sering kali dipengaruhi oleh mitra koalisi, mengurangi otonomi partai. Sebaliknya, di tingkat daerah, Partai Persatuan Pembangunan lebih mampu menjaga kemandirian kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan konstituen lokal. Hal ini mencerminkan bahwa struktur internal Partai Persatuan Pembangunan memiliki fleksibilitas dalam mempertahankan otonomi keputusan, terutama ketika berada di luar tekanan elite politik nasional. Citra publik Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam moderat mengalami tekanan akibat kebijakan pragmatis yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar partai. Namun, di tingkat lokal, citra ini relatif lebih kuat karena implementasi kebijakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Responsivitas terhadap isu-isu kesejahteraan menjadikan Partai Persatuan Pembangunan tetap relevan di mata publik daerah. Citra ini sesuai dengan konsep reifikasi menurut Randall dan Svasand yang menyatakan bahwa keberhasilan partai membangun persepsi publik sangat bergantung pada konsistensi antara simbol, narasi, dan tindakan politik.

### ***Faktor Penghambat Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2024***

Kesisteman Partai Persatuan Pembangunan menghadapi hambatan berupa fragmentasi komunikasi antara tingkat pusat dan daerah, yang berdampak pada ketidakefektifan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan lokal. Meski struktur organisasi telah dibentuk secara sistematis, adanya dominasi pengambilan keputusan oleh pusat mengurangi otonomi daerah yang seharusnya menjadi bagian penting dari sistem desentralisasi. Beberapa keputusan strategis dipengaruhi oleh pertimbangan koalisi, bukan murni dari kebutuhan daerah. Namun, di sisi lain, kesisteman di tingkat daerah justru lebih efektif karena responsif terhadap kebutuhan konstituen. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pusat dan daerah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesisteman partai secara menyeluruh. Identitas nilai Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam moderat mengalami tantangan akibat praktik politik pragmatis dalam koalisi. Di tingkat internal, PPP tetap berupaya menjaga nilai ideologis sebagai pijakan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

127

Indexed



SINTA 5



utama pengambilan kebijakan. Namun, keterlibatan dalam koalisi menyebabkan inkonsistensi antara nilai-nilai yang diusung dengan kebijakan yang dijalankan, sehingga membingungkan publik dalam memahami posisi ideologis partai. Meski demikian, di tingkat daerah, identitas nilai lebih terjaga karena kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal. Ketidaksesuaian antara prinsip ideologi dan praktik politik ini menunjukkan lemahnya *value infusion* Partai Persatuan Pembangunan secara nasional.

Partai Persatuan Pembangunan menghadapi tekanan besar dalam menjaga otonomi keputusan, terutama di tingkat pusat. Banyak keputusan strategis yang diambil dalam konteks koalisi tidak sepenuhnya berasal dari proses internal partai, melainkan dipengaruhi oleh kompromi politik dengan mitra koalisi. Hal ini mengurangi kapasitas Partai Persatuan Pembangunan untuk menentukan arah politik secara independen, sebagaimana disyaratkan dalam teori pelebagaan partai. Namun, otonomi ini lebih terjaga di tingkat daerah, di mana keputusan politik lebih dekat dengan kebutuhan konstituen lokal. Ketimpangan antara pusat dan daerah ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperkuat struktur kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan. Citra publik Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam moderat terganggu oleh keputusan politik yang diambil demi stabilitas koalisi, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai ideologis partai. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam persepsi publik mengenai konsistensi Partai Persatuan Pembangunan, mengancam reifikasi partai secara nasional. Meski demikian, di tingkat daerah, Partai Persatuan Pembangunan mampu menjaga citra publik yang lebih konsisten berkat kebijakan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa citra partai lebih kuat bila dibangun dari bawah ke atas melalui pendekatan yang responsif dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada temuan data di tingkat internal, strategi ini terkait dengan kesisteman yang mencakup penguatan struktur organisasi yang solid, dengan adanya peraturan yang jelas dalam AD/ART partai. Hal ini memperlihatkan komitmen Partai Persatuan Pembangunan untuk memastikan keberlanjutan organisasi dari pusat hingga ke akar rumput, yang esensial dalam menghadapi tantangan pemilu. Identitas nilai yang ditegakkan, seperti nilai Islam moderat, juga menjadi dasar dalam upaya PPP membangun citra publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Namun, meskipun terdapat strategi yang berfokus pada penguatan internal, penelitian ini juga menunjukkan bahwa PPP menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan ideologi dengan tuntutan pragmatisme politik, terutama dalam koalisi politik.

Kebijakan yang diambil dalam kerangka koalisi ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai ideologis yang diusung PPP, yang menyebabkan ketegangan dalam membangun reifikasi partai yang konsisten. Di sisi eksternal, citra publik Partai Persatuan Pembangunan lebih mudah dipertahankan di tingkat daerah melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meskipun ada tantangan dalam mempertahankan identitas partai di tingkat nasional. Dalam hasil penelitian Faktor pendukung internal yang utama adalah struktur organisasi yang kuat, yang memungkinkan Partai Persatuan Pembangunan untuk menjalankan tugas-tugas internal secara efektif dan efisien. Namun, penguatan kesisteman ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah yang muncul akibat ketegangan dalam implementasi identitas nilai, yang dapat mengaburkan citra publik PPP. Faktor eksternal yang mendukung pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan adalah otonomi keputusan partai yang memungkinkan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengambil keputusan strategis tanpa intervensi eksternal yang berlebihan. Namun, temuan juga mengungkapkan bahwa PPP sering kali terpaksa mengikuti keputusan koalisi yang mengurangi tingkat otonomi tersebut, sehingga merugikan strategi pelebagaan partai dalam jangka panjang.

Ketergantungan pada keputusan koalisi pragmatis ini juga membatasi kemampuan Partai Persatuan Pembangunan dalam mempertahankan citra publik sebagai partai yang moderat dan konsisten dengan

nilai-nilai Islam yang dianutnya. Di sisi lain, faktor penghambat yang signifikan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan adalah ketidakmampuan untuk menjaga konsistensi nilai ideologis pada tingkat pusat, yang semakin tergerus oleh kompromi politik yang dilakukan dalam kerangka koalisi. Keterlibatan dalam koalisi ini memperburuk kesulitan dalam mempertahankan reifikasi, yang pada gilirannya menurunkan daya tarik PPP di mata pemilih, terutama generasi muda yang lebih pragmatis dan mengutamakan solusi nyata terhadap isu-isu sosial-ekonomi.

## REFERENSI

- Admin Indonesia investments. (2018, April 12). Reformasi: Tantangan & Perubahan Baru untuk Indonesia. *Indonesia-Investments.Com*. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/reformasi/item181>
- Alawi, A. (2019, April 28). NU dan Pemilu Pertama di Indonesia Tahun 1955. *NU Online*. <https://nu.or.id/fragmen/nu-dan-pemilu-pertama-di-indonesia-tahun-1955-Hf6jW>
- Admin Tempo. (2024, Maret 22). Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/pemilu/pertama-kali-tak-lolos-ke-parlemen-berikut-perolehan-suara-ppp-dalam-5-pemilu-terakhir-74893>
- Alawi, A. (2019, April 28). NU dan Pemilu Pertama di Indonesia Tahun 1955. *NU Online*. <https://nu.or.id/fragmen/nu-dan-pemilu-pertama-di-indonesia-tahun-1955-Hf6jW>
- Antaraneews. (2024, Oktober 30). Indeks Pelebagaan Parpol parlemen periode 2019–2024 sebesar 74,16. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4431237/indeks-pelebagaan-parpol-parlemen-periode-2019-2024-sebesar-7416>
- Azra, A. (1970). NU: *Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia*. *Studia Islamika*, 4(4). <https://doi.org/10.15408/sdi.v4i4.770>
- BRIN. (2024, Oktober). Indeks Pelebagaan Partai Politik. *BRIN*.
- Federspiel, H. M. . (2020). *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State : The Persatuan Islam ( Persis ), 1923 to 1957. 1957(February 2003)*. <https://doi.org/10.1017/S0020743803370072>
- Gaffar, A. (2023, April 28). Ganjar dan Ijtihad Konsistensi PPP. *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/kolom/d-6695178/ganjar-dan-ijtihad-konsistensi-ppp>
- Hermawati. (2020). Islam Indonesia. Adab Pres Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Yogyakarta
- Hidayatullah, S. (2019). *Gagasan Islam Nusantara*. Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 3, 1–20.
- Jackson, K. D. (2023). *Traditional Authority, Islam, and Rebellion A Study of Indonesian Political Behavior*. *Cslifornia University of California Press*".
- Jimenez Salim, H. (2024, Februari). Daftar Partai Politik Pemilu 2024 yang Lolos dan Tak Lolos Parlemen Versi Quick Count. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5531084/daftar-partai-politik-pemilu-2024-yang-lolos-dan-tak-lolos-parlemen-versi-quick-count>
- KPU. (2022, December 30). Berikut 24 Partai Politik yang lolos ke pemilu 2024. *KPU*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>
- Mas'ad, A. (2019). *Fragmentasi Partai-Partai Islam Pasca Orde Baru*. Jurnal Keislaman, 2(1), 48–55. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3374>
- Naku, R. K. , Zulkarnain, I. , & Ridho, H. (2024). *Political Communication Strategy of The Golongan Karya Party in Manggarai Regency for Winning The 2024 Elections in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara*. Journal of Social Interactions and Humanities, 3(2), 191–220. <https://doi.org/10.55927/jsih.v3i2.10227>
- Nicholas Ryan Aditya, N. S. (2022, Desember 15). Soal Partai yang Akan Gabung KIB, PPP: Bisa Jadi Non Parlemen atau di Luar Barisan Koalisi Jokowi. *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/15/20200761/soal-partai-yang-akan-gabung-kib-ppp-bisa-jadi-non-parlemen-atau-di-luar>

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- Priyono, H. Y. (2023). Perdebatan dalam Sidang BPUPKI tentang Dasar Negara (29 Mei - 17 Juli 1945). UIN Alauddin Makassar.
- Rahadian, L. (2018, Agustus 9). Parpol Pendukung Jokowi Pakai Nama 'Koalisi Indonesia Kerja'. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/parpol-pendukung-jokowi-pakai-nama-koalisi-indonesia-kerja-cRha>
- Ricklefs, M. . (1993). *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*. Stanford: Stanford University Press.
- Romli, L. (2011). *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*. *Politica*, 2(2), 199–220.
- Saptohutomo Putranto, A. (2024, Februari 16). Perpecahan Internal Dianggap Faktor Suara PPP Melorot di Pileg 2024. *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/21052361/perpecahan-internal-dianggap-faktor-suara-ppp-melorot-di-pileg-2024?page=all>
- Sidik, F. M. (2022, September 11). PPP Dinilai Tengah Bereksperimen Usai Mardiono Kudeta Suharso Monoarfa. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6284824/ppp-dinilai-tengah-bereksperimen-usai-mardiono-kudeta-suharso-monoarfa>
- Subekti. (2019, Juli 9). Membaca Koalisi Hasil Pemilu 2019. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/kolom/membaca-koalisi-hasil-pemilu-2019-729363>
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Pt Kompas Media Nusantara.
- Suryana, Y. (2018). *Partai Politik di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: UB Press
- Vicky Randal dan Lars Svasand. (2002a). *Party Institutionalization In New democracies*. *Party Politics*, 8(1), 6.
- Vicky Randall dan Lars Svasand. (2002b). *Party Institutionalization In New democracies*. *Party Politics*, 8(1), 12.
- Yuniarto, B. (2016). *Kedudukan dan fungsi polisi dalam sistem politik*. Yogyakarta: Deepublish.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

130

